

STRATEGI PENGEMBANGAN MADRASAH EFEKTIF MELALUI PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH BERBASIS *ZISWA-SCHOOL LEVY* (Studi di MI Ya Bakii Karangjengkol Kesugihan Cilacap)

Umi Zulfa

IAIG Cilacap

This research was aimed at describing and explaining: (1) the implementation of Educational Financing Management at MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap, (2) analysis existing model of Educational Financing Management Based Ziswa-School Levy (Study at MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap and (3) to formulate conceptual Development Model of Educational Financing Management Based Ziswa-School Levy. This research to study existing objectives by using a qualitative approach and research and development from Borg and gall. The object of this research was the implementation of Educational Financing Management Based Ziswa-School Levy and its conceptual Development Model of Educational Financing Management Based Ziswa-School Levy in MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan. The data were obtained by conducting a direct observation in the field, in-depht interviews and documentation. The technique of data analysis was qualitative analysis of the interactive model. The result of the research show that: the implementation of educational financing management at MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap so acountable, and not yet utilization ziswa as educational financing sources its rich, and sustainable.

Keyword: *Strategy, management, school*

A. Latar Belakang

Pembiayaan pendidikan dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia merupakan komponen strategik yang akan menentukan tercapai tidaknya tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bermutu tidaknya praktik pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh komponen pembiayaan pendidikan. Melihat begitu strategiknya peran pembiayaan pendidikan, maka negara lewat UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kemudian dalam BAB III Pasal 5 ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Landasan yuridis ini diperkuat dengan PP. No. 48 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, anggaran pemerintah daerah, dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat).

Pengaturan ini penting dilakukan agar terjamin kebermutuan dari sekolah khususnya mutu pembiayaan pendidikan sebagai salah satu dari 8 standar (mutu) pendidikan nasional sebagaimana terjabarkan dalam PPN0.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 dan 4 diatur hal-hal yang terkait dengan mutu. Dalam Pasal 2 ayat (1): disebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Sedangkan tujuan SNP selanjutnya disebutkan dalam pasal 4: SNP bertujuan *menjamin mutu* pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Dengan adanya regulasi tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia, idealnya persoalan pembiayaan pendidikan yang berujung kepada tidak efektif, tidak efisien dan tidak bermutunya pendidikan di Indonesia semestinya tidak akan muncul, setidaknya bisa diminimalisir. Tetapi pada kenyataannya, persoalan tersebut masih banyak muncul. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil amatan atas kondisi real di Indonesia dari berbagai sumber, seperti: masih banyak anak usia sekolah tidak sekolah walaupun sudah ada kebijakan BOS, BSM dan sebagainya. Masih banyak sekolah/madrasah yang tidak bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai.

Akibat persoalan ini, maka seolah-olah pendidikan di Indonesia masih berkuat dengan persoalan akses pendidikan. Padahal sesuai dengan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional (Renstra Diknas) maka arah kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia meliputi: a) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, b) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan c) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Tiga pilar ini juga berkuat pada persoalan “mutu”.

Sebenarnya jika kita sejenak menengok sekilas tentang praktek pembiayaan pendidikan masa khilafah sebagaimana pendapat An Nabhani dalam Al Jawi (2008), ternyata pembiayaan pendidikan dimenej oleh Baitul Mal yang kemudian secara garis besar dibelanjakan (*distribution*) untuk 2 kepentingan. *Pertama*, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. *Kedua*, untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan pada masa itu berasal dari umat yang dikelola oleh baitul mal. Jika hal ini dilakukan dalam konteks ke-Indonesia-an, maka persoalan anggaran pendidikan yang hanya 20% dari APBN bisa teratasi, serta tidak adanya alasan rendahnya mutu pendidikan karena terbatasnya sumber pembiayaan pendidikan juga bisa ditepis, karena hal tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan potensi sumber pembiayaan pendidikan umat Islam di Indonesia yang sangat melimpah seperti dari zakat, infaq, shadakah, wakaf, dan sedekah.

MI Ya BAKII Kesugihan di Karangjengkol, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (Yayasan), di mana satu kecamatan terdiri dari 16 MI Ya BAKII, maka sudah sepantasnya tidak lagi berkuat dengan persoalan pembiayaan pendidikan karena bisa memanfaatkan sumber dari Ziswa ditambah juga dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai macam perusahaan/industri yang ada di kabupaten Cilacap, seperti Pertamina, Holcim, Pengolahan Ikan dan sebagainya. Sehingga prinsip dari penyelenggara untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat bisa diwujudkan oleh madrasah-madrasah yang mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakatnya melalui pengembangan sekolah efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menarik sekaligus krusial untuk segera dilakukan agar bisa membuka wacana baru tentang potensi ditemukannya sumber pembiayaan pendidikan yang baru, melimpah, keberlangsungannya tinggisekaligus dekat dengan masyarakat sehingga mampu memediasi kemandirian sekolah menuju sekolah efektif.

B. Ruang lingkup dan gambaran permasalahan

Penelitian ini dibatasi pada kondisi empirik dan konsep ziswa-*school levy* untuk kemudian dikembangkan model manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis ziswa-*school levy*.

C. Asumsi yang digunakan

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: a) semakin banyak sumber pembiayaan pendidikan maka semakin terjamin proses pendidikan yang bermutu, b) potensi sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia yang kaya dan sustainable bisa diberdayakan dari Ziswa (Zakat, infaq, sadaqah dan wakaf) sebagaimana *school levy* di AS.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap?

2. Bagaimana temuan model manajemen pembiayaan pendidikan berbasis *Ziswa-school levy* di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap?
3. Bagaimana formulasi pengembangan model konseptual manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis *Ziswa-school levy*?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan umum penelitian ini adalah “*ditemukan dan dikembangkannya alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis Ziswa-School Levy*”. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini ada 3, yaitu:

- a. Mendeskripsikan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap
- b. Menganalisis temuan model manajemen pembiayaan pendidikan berbasis *Ziswa-school levy* di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap
- c. Menyusun atau menformulasikan pengembangan model konseptual manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis *Ziswa-school levy*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kemanfaatan berupa penambahan khasanah keilmuan khususnya tentang manajemen pendidikan dan secara praktis memberikan sumbangan real tentang alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan yang kaya, melimpah, sustainable serta menjamin kebermutuan pendidikan di Indonesia.

F. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritik

a. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Berbicara tentang konsep manajemen pembiayaan pendidikan setidaknya berbicara tentang pembiayaan pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan dan fungsi-fungsi (operatif) manajemen pendidikan itu sendiri. Menurut Nanang Fatah pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup; gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadalan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervise pendidikan (Fattah, 2000). Kemudian konsep kedua adalah konsep manajemen pembiayaan pendidikan atau Manajemen Keuangan Pendidikan merupakan aplikasi konsep dan unsur-unsur manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan keuangan organisasi/satuan pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara sistematis dan sinergis (Sa'ud, 2009).

Dalam konsep manajemen pembiayaan pendidikan maka akan muncul konsep fungsi

manajemen pembiayaan pendidikan. Secara umum, aktivitas manajemen pembiayaan pendidikan paling tidak mencakup tiga tahap penting yaitu perencanaan keuangan (*budgeting*), implementasi/pelaksanaan pengeluaran keuangan (*accounting*) dan tahap penilaian atau evaluasi keuangan (*auditing*) (Jones, 1985: 5; dan Fahrurrozi, 2012:229).¹ Perencanaan mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan implementasi merupakan tindakan lanjut dari rencana yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan evaluasi merupakan tahap penentuan bahwa sasaran yang telah direncanakan benar-benar telah tercapai.

b. Konsep School Levy Dalam Pembiayaan Pendidikan

Konsep *school levy* sebenarnya ditemukan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan di Amerika. Pengertian umum *school levy* adalah sekolah yang mengandalkan sumber utama pembiayaan pendidikannya dari pajak (Kranz, 2004:1) Disebut *levy* karena merekrut atau mengambil dana dari pajak, sehingga sering juga disebut sebagai *school tax levies* atau sekolah yang mengambil dana pajak untuk memenuhi keperluan pendidikan. Dari pendapat Kranz tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap sekolah yang dalam penyelenggaraannya didukung oleh pajak maka bisa disebut sebagai *school levy*. Artinya konsep *school levy* dalam manajemen pembiayaan pendidikan sesungguhnya berbicara dalam konteks sumber-sumber pembiayaan pendidikan.

Informasi tentang *school levy* juga bisa dilihat dalam ketetapan *State School Levies Credit* yang dikeluarkan *Wisconsin Department of Revenue, Division of Research and Policy* pada 3 Desember 2008, dengan apa yang disebut dengan *State School Levies*. Produk *state school levies* dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kredit pajak kekayaan '*property tax*' untuk pertama kali dibayarkan pada tahun 1962/1963 untuk tahun pembayaran pajak bagi pajak kekayaan tanah dan bangunan serta pajak kekayaan pribadi (situs web Wisconsin Department Revenue: <http://dor.wa.gov>).

Konsep *school levy* muncul sebagai akibat pembagian antara dana pusat (Pemerintah Federal) dengan lokal (Pemerintah Distrik). Selama ini, pajak properti dikumpulkan sebagai sumber keuangan umum dan didistribusikan kepada sekolah-sekolah distrik melalui negara bagian dengan sejumlah pengaturan, sebagaimana dijelaskan dalam situs web Department of Revenue Washington State (2009:1) sebagai berikut:

Property tax is the primary funding source for Washington's public schools. Two types of property tax levies support the state school system: the state School levy paid by all Washington property owners for public schools; and special levies approved by voters for a specific school district.....Whereas revenues from special levies may only be used for that school district, all funds collected from the state property tax levy are deposited in the state's general fund. This money is distributed to school districts throughout the state on a set formula.

¹ Jones, Thomas H, (1985), *Introduction To School Finance Technique and Social Policy*, New York: McMillan Publishing Company. Jones, 1985, hlm. 5

Sebagai sebuah konsep yang sudah efektif dipraktikkan, menurut Cagnetti, *school levy* memiliki karakteristik sebagai berikut:²

- 1) Perekruitan/penarikan uang dari pajak untuk sekolah dilakukan setiap tahun, terutama penarikan pajak properti.
- 2) Terjadinya peningkatan penarikan sebesar 2 sampai 3 % akibat inflasi pada tahun sebelumnya.
- 3) Di lapangan terjadi peningkatan biaya operasional sekolah publik untuk taman kanak-kanak, pra sekolah, penasihat komputer, layanan kesehatan dan pelatihan guru.
- 4) Gaji menjadi kesepakatan besar atas perekruitan pajak.
- 5) Kenaikan gaji guru rata-rata naik 2,5 % sampai 5 % per tahun.

c. Konsep Ziswa dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Jika di negara asal konsep *school levy*, sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pajak terutama pajak property, maka jika diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik di Indonesia; di mana masyarakat mayoritas Islam berada bukan dalam negara Islam, yang implikasinya tidak hanya membayar pajak tetapi juga zakat dan lainnya, sedangkan pajak tidak dialokasikan secara khusus dari awal untuk menjamin pendidikan yang bermutu, maka pajak tersebut bisa diganti dengan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan lainnya.³ Apalagi dalam khasanah Islam, praktik ziswa sebagai sumber pembiayaan pendidikan juga bisa ditemukan misalnya pada masa kekhalifahan Islam abad IV H.⁴ Bahkan pada masa khalifah Umar dan Utsman, pembiayaan pendidikan seperti untuk memberi gaji kepada guru, muadzin dan imam sholat jama'ah. diambilkan dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal dari *Hizyah*, *kharaj* (pajak tanah), dan *usyur* (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara), demikian pendapat Rahman (1995), Azmi (2002) dan Muhammad (2002) dalam Al Jawi (2011).⁵ Artinya pada masa sahabat sumber pembiayaan pendidikan bisa dari *Hizyah*, *kharaj* (pajak tanah), dan *usyur* (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara). Sehingga tidak heran pada masa abad ke IV H, kekhalifahan Islam telah mampu memberikan pendidikan gratis pada rakyatnya.

d. Konsep Sekolah Efektif

Sekolah sebagaimana organisasi lain akan disebut sukses dibangun jika sekolah menjadi organisasi yang sehat. Adapun yang dimaksud dengan keefektifan organisasi adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana organisasi mewujudkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang dicapai (Akdon, 2007: 70). Artinya sekolah akan dikatakan sebagai sekolah efektif jika sekolah dapat mencapai tujuan-tujuannya melalui aktivitas yang sudah dilakukannya.

2 Linda Cagnetti, *School Levies, Informed Voter Are Better's Voter . Here's to primer to Help You*. t.tp, 2009, hlm. 1

3 Umi Zulfa, *Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Analisis School Levy*. Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djai Bandung Bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia, 2012, hlm. 239-254

4 Khalid, Al Jawi, "Pembiayaan Pendidikan dalam Islam", 2008, dalam: <http://taukhid.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011.

5 M. Shiddiq, Al Jawi, "Pembiayaan Pendidikan dalam Islam", 2008, dalam: <http://taukhid.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011.

2. Hasil Penelitian Terdahulu

Laporan hasil penelitian Fahrurozi yang dipublikasikan dalam jurnal Media Pendidikan (2012: 232) tentang manajemen pembiayaan pendidikan madrasah di kota Semarang menyampaikan bahwa: a) dalam melaksanakan fungsi budgeting, madrasah telah melaksanakan hal-hal: (1) penyusunan RAPBM dilakukan oleh tim, (2) b) rapat tim dihadiri oleh semua unsur, (3) c) penyusunan RAPBM didasarkan atas analisis kebutuhan, (4) penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, (5) sumber dana yang variatif dan (6) alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan. b) dalam melaksanakan fungsi accounting madrasah melaksanakan: (1) APBM disosialisasikan kepada warga madrasah, (2) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan, (3) ada buku kontrol pemasukan, (4) ada buku kas/ pembukuan keuangan, (5) SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan (6) ada berita acara pemeriksaan administrasi keuangan. Kemudian c) pelaksanaan fungsi auditing, hal-hal yang sudah dilaksanakan madrasah adalah: (1) pengelolaan keuangan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan, pemerintah, guru, komite dan wali siswa secara periodik, (2) pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaporkan secara terbuka dalam rapat pleno komite.

Dilihat dari kajiannya, maka penelitian ini memiliki kemiripan yaitu sama-sama berbicara tentang manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah. Tetapi titik perbedaannya adalah penelitian Fahrurozi tidak mendasarkan diri pada pengembangan model pembiayaan pendidikan madrasah yang berbasis ziswa sekaligus *school levy*.

3. Hubungan Masalah Penelitian, Kerangka Teori dan Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan paparan tersebut, maka persoalan sulitnya madrasah mencari alternatif sumber pembiayaan pendidikan, maupun hasil penelitian terdahulu bisa diurai dan dicari solusinya jika penelitian ini dilakukan, sehingga akan menghasilkan temuan model sekaligus pengembangan model konseptual dari konsep ziswa dan *school levy* sebagai alternatif sumber pembiayaan madrasah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pembiayaan pendidikan khususnya fungsi *budgeting*.

G. Metode Penelitian

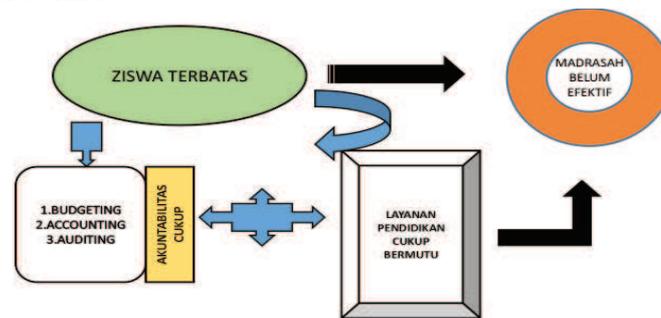
Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian ini terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu proses pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode *in-depth interview*, observasi dan dokumentasi dengan tetap memperhatikan keabsahan data. Sehingga pada proses ini menggunakan triangulasi data. Sedangkan untuk memperkaya data dilakukan perpanjangan waktu penelitian. Setelah data terkumpul maka dilakukan pengelolaan data dengan membuat kodifikasi berdasarkan fokus dan turunannya dari setiap aspek dalam pertanyaan penelitian yang juga didasarkan pada proses penggalian data. Baru setelah itu dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif, yang sesungguhnya dilakukan sejak dari awal, selama dan setelah penelitian secara interaktif.

Kemudian selain menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang dipilih adalah R and D yang mengacu dari Borg and Gall (1983: 626),⁶ maka penelitian ini memiliki tahapan sebagai berikut: a). Penelitian dan pengumpulan informasi, b). perencanaan, c). Pengembangan produk, d). Uji lapangan awal, e). Revisi produk utama, f). Uji lapangan lanjut, g). Revisi produksi operasional, h). Uji lapangan operasional, i). Uji lapangan akhir, j). Diseminasi dan implementasi. Tetapi penelitian ini pengembangan (development) yang dilakukan hanya sampai kepada pengembangan produk akhir berupa Model manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis ziswa-school levy sebagai model manajemen pembiayaan pendidikan. Jadi tidak sampai kepada desiminasi dan implementasi mengingat terbatasnya waktu.

H. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

1. Temuan Model

Berdasarkan temuan dan proposisi temuan penelitian yang sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka temuan model konseptual atas penelitian ini adalah sebagaimana bisa dilihat dalam gambar berikut.



Bagan

Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Dari model temuan tersebut diperoleh informasi bahwa MI Ya BAKII Karangjengkol dalam melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan yang menyebabkan madrasah efektif belum sepenuhnya terwujud. Hal-hal yang dimaksud adalah:

1. Fungsi –fungsi manajemen pembiayaan pendidikan dilaksanakan hanya samoai tingkat “cukup akuntabel”
2. Pelaksanaan fungsi budgeting, masih minim sumber dana dan belum memanfaatkan ziswa secara optimal (ziswa terbatas). Padahal ziswa merupakan sumber dana pendidikan yang sangat berlimpah, kaya dan sustainable.
3. Akibat dari pemanfaatan ziswa yang terbatas, maka layan pendidikan yang bermutu belum sepenuhnya terwujud (cukup bermutu).
4. Akibat kedua adalah terbentuknya madrasah belum efektif.

⁶ Borg and Gall, 1983: 626

2. Model Pengembangan Konseptual

Berdasarkan temuan dan proposisi temuan penelitian yang sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disusun alternatif model konseptual yang bisa ditawarkan, yaitu Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Ziswa Berorientasi Madrasah Efektif. Model ini dikembangkan dengan melandaskan diri pada teori-pikir dan empirik.

Landasan pikir pertama berangkat dari teori bahwa pendidikan bermutu akan bisa diberikan kepada peserta didik jika madrasah mampu memenuhi dan mengembangkan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan. Standar mutu pendidikan yang dimaksud adalah 8 standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah (Permendiknas).

Landasan kedua, salah satu standar nasional pendidikan adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan pendidikan akan bisa berpengaruh terhadap kebermutuan layanan pendidikan jika dimenej dengan baik dan akuntabel. Manajemen pembiayaan pendidikan yang baik dan akuntabel adalah manajemen pembiayaan yang melaksanakan seluruh fungsinya secara akuntabel sesuai dengan indikator yang telah ditentukan (Fakhrurozie, 2012)

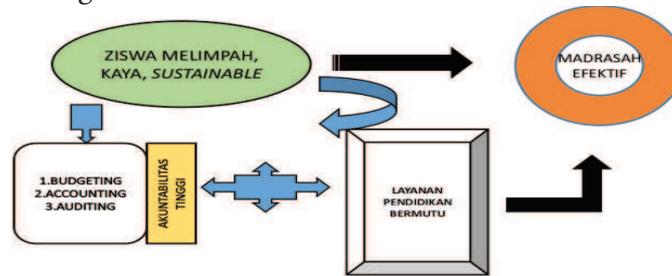
Landasan ketiga. Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik semestinya memiliki sumber dana yang kaya, melimpah dan sustainable. Idealnya sumber dana (*Financing Sources*) pembiayaan pendidikan bisa diperoleh melalui pajak (*tax*), APBN, APBD, Grants, kontributor dan *loan* (pinjaman),⁷ atau jika merujuk pada PP No. 48 Tahun 2008, maka sumber pendanaan pendidikan bisa berasal dari anggaran Pemerintah Pusat (APBN), anggaran pemerintah daerah (APBD), dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat). Mengingat madrasah adalah lembaga pendidikan berbasis umat Islam, maka pengadaan sumber dana bisa memanfaatkan potensi ekonomi umat berupa ziswa (zakat, infaq, sadakah dan wakaf).

Landasan keempat, keefektifan madrasah banyak ditentukan oleh proses pendidikan yang bermutu yang mengacu kepada 8 standar sekaligus diback up oleh sumber dana dan praktik manajemen pembiayaan pendidikan yang akuntabel dan bermutu. Sehingga berkontribusi bagi naiknya minat belajar (kehadiran siswa lengkap), antusiasme belajar tinggi, guru konsisten melaksanakan tugasnya termasuk selalu memberi sekaligus menilai pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa sebagai latihan maupun pengayaan, mempertinggi ragam dan kualitas kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan selalu mendapatkan dukungan masyarakat dan orang tua. Di mana ciri-ciri ini merupakan indikator sekolah efektif (Sergiovani dalam Umiarso dan Gojali, 2011).

Landasan kelima, landasan empirik dari temuan penelitian tentang praktik manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII Karangjengkol yang hanya cukup akuntabel serta sumber dana pendidikan terbatas menyebabkan layanan pendidikan tidak bermutu tinggi, berdampak pada gelar “madrasah efektif” belum sepenuhnya bisa diraih.

⁷ M. Fakry Gaffar, “Pembiayaan Pendidikan Nasional”, Handout Perkuliahan Pembiayaan Pendidikan PPS Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2009.

Berdasarkan landasan pikir-teoritik dan empirik, maka disusunlah pengembangan model konsptual sebagaimana bagan berikut:



Bagan

Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Ziswa Berorientasi Madrasah Efektif

Sebagai model konseptual yang baru ditawarkan, jelas model ini berupaya untuk mengatasi kelemahan yang ada di lapangan. Sebagaimana temuan penelitian bahwa praktik manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII memiliki dua kelemahan utama yaitu belum akuntabel, belum memiliki sumber dana yang kaya, melimpah dan sustainable dan belum fokus pada pencapaian madrasah efektif. Oleh karena itu model konseptual yang baru ini adalah model manajemen pembiayaan pendidikan yang harus memiliki **karakteristik:**

- e. Seluruh fungsi manajemen pembiayaan pendidikan harus **akuntabel**
- f. Sekolah harus memiliki **sumber dana** pendidikan berbasis umat yang **kaya, melimpah dan sustainable** yaitu berbasis ziswa.
- g. Fokus layanan pendidikan yang bermutu berdampak pada pencapaian **madrasah efektif**.

Ketiga karakteristik yang sekaligus menjadi syarat efektifnya praktik manajemen pembiayaan pendidikan yang mampu mewujudkan madrasah efektif-madrasah bermutu, merupakan tesis berdasarkan hasil analisis temuan penelitian ini, yaitu:

- a. Manajemen pembiayaan pendidikan yang **akuntabel** akan mempengaruhi terbentuknya layanan pendidikan yang bermutu dan madrasah efektif.
- b. Manajemen pembiayaan pendidikan yang memiliki **sumber dana kaya, melimpah dan sustainable** mampu mempertinggi mutu layanan pendidikan.
- c. Mutu layanan pendidikan yang optimal akan berdampak pada predikat **madrasah efektif**.

I. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian, maka bisa ditarik simpulan bahwa “Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan cukup akuntabel, dan belum memanfaatkan ziswa sebagai sumber dana pendidikan yang kaya, melimpah dan sustainable”.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dikembangkan model konseptual “Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Ziswa Berorientasi Madrasah Efektif”, yang memiliki tiga karakteristik: akuntabel, sumber dana melimpah, kaya, dan sustainable serta fokus pada madrasah efektif.

Bibliografi

- Albab, Ulul, (2011), *Perbandingan Kebijakan Pendidikan Amerika Serikat –Indonesia*, tersedia dalam: <http://muhlis.files.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011
- Al Jawi, M. Shiddiq. 2008. “Pembiayaan Pendidikan dalam Islam”, tersedia dalam: <http://taukhid.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011-02-02
- Alma, Bukhari dan Hurriyati, Ratih (Eds), (2008), *Manajemen Corporate Dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan. Fokus Pada Mutu Dan Layanan Prima*, Bandung: Alfabeta.
- Anwar, Moch.Idochi.(2004). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Cagnetti, Linda (2009), *School Levies, Informed Voter Are Better's Votter . Here's to primer to Help You*.
- Depdiknas, (2001), *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 1, Konsep dan Pelaksanaannya*. Jakarta: diknas Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah lanjutan Tingkat Pertama.
- Fattah, Nanang, (2012), *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam Konteks Penerapan MBS*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Komariyah, Aan Dan Triatna, Cepi, (2006), *Visionary Leadership Menuju Sekolah efektif*, Jakarta: Bumi Aksara
- Khusnuridlo, Moh, (2010), *Sumber-sumber Pendapatan Sekolah*, tersedia dalam: <http://www.khusnuridlo.com>, diambil tanggal 2 februari 2011.
- Fahrurrozi, (2008), *Kepemimpinan Pendidikan Visioner-Transformasional*, makalah, Perkuliahan,, Program Doktor Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fatah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.
- Gaffar, M. Fakry. 2009. “Pembiayaan Pendidikan Nasional”, Handout Perkuliahan Pembiayaan Pendidikan PPS Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Jones, Thomas H, (1985), *Introduction To School Finance Technique and Social Policy*, New York: McMillan Publishing Company.
- Johns, Roe L., Morphet, Edgar L and Alexander, Kern (1983), *The Economic and Financing of*

Education. 4Th Edition, New Jersey: Prentice Hall, inc

M.Bird, Richard, (1990) "Tax Policy and Economic Development" tahun 1990.

Mulyasa, E, (2002), *Manajemen Berbasis Sekolah*, bandung: Remaja Rosdakarya

Nurhadi, Mulyani A, (1993), *Efisiensi Pendidikan*, Yogyakarta: FIP.IKIP Yogyakarta

Zulfa, Umi.(2012). *Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Analisis School Levy*. Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djai Bandung Bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia.

_____ (2013), *Membangun Madrasah bermutu Mellalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia)*. Jurnal Kependidikan. Vol.1 N0.1 Nopember 2013. Kelompok Kajian Pendidikan Ikatan Alumni STAIN Purwokerto.

_____ (2013), *Alternatif Model Penilaian dan Pengembangan Kinerja Dosen. Strategi Akselerasi Pengembangan Kinerja Dosen dan Perguruan Tinggi*. Cilacap: Ihya Media

DLL